

Judul : Perawat tolak RUU kesehatan
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 5

| OMNIBUS LAW |

Perawat Tolak RUU Kesehatan

Bisnis, JAKARTA — Persatuan Perawat Nasional Indonesia berpandangan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan bakal menurunkan eksistensi profesi perawat dan sistem kesehatan nasional.

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) secara otomatis akan mencabut Undang-Undang (UU) No. 38/2014 tentang Keperawatan. Padahal, menurutnya, beleid itu telah mengatur spesifik keperawatan dan menjadi acuan pengembangan profesi perawat.

"Hanya ada satu pasal tentang tenaga keperawatan pada bab SDM Kesehatan. [Ini] mendegradasi eksistensi profesi perawat dalam sistem kesehatan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/5).

Harif membeberkan bahwa ketentuan terkait dengan perawat,

keperawatan, praktik keperawatan tugas dan wewenang perawat dan pengembangan kompetensi, pendidikan perawat, tidak dimuat dalam draf RUU Kesehatan itu.

Selain itu, RUU Kesehatan juga akan memudahkan perawat asing masuk ke Indonesia. Padahal, dia menilai masih banyak perawat-perawat Indonesia yang bisa mengisi ruang pekerjaan tersebut. "Ini akan menyebabkan perlindungan dan kepastian hukum perawat dan masyarakat melemah," ucapnya.

Selain itu, Harif juga menyoroti sistem kesehatan nasional tersentralistik jika RUU Kesehatan disahkan. Menurutnya, RUU itu akan mengurangi peran masyarakat madani termasuk organisasi profesi yang kontra dengan kebijakan pemerintah.

"Potensi diskriminasi kebijakan turunan UU karena membedakan tenaga medis dan tenaga

kesehatan dalam rumusan aspek-aspeknya. RUU ini juga tidak mengatur tentang kesejahteraan tenaga kesehatan yang di Indonesia sangat lemah dan rendah," ujar Harif.

Sebelumnya, organisasi dokter menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Kesehatan pada Senin (8/5). Para dokter dan tenaga kesehatan mengancam akan mogok nasional jika tuntutan tak dipenuhi.

Sementara itu, pengajar bidang studi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Ahlan mengatakan RUU Kesehatan akan menuai pro dan kontra karena konsekuensi beleid tersebut memuat substansi lebih banyak.

"Ini kan menggantikan sembilan undang-undang. Subjek yang diatur lebih kompleks, maka wajar pro dan kontranya lebih banyak," ujarnya kepada *Bisnis*. (Indra Gunawan)

Perbaikan Kualitas
Tenaga Kesehatan,
Jadi Poin Penting
RUU Kesehatan?

